

**PELAPORAN LHKPN  
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG  
TAHUN 2024**

NO.	NIK	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	INSTANSI	EMAIL	NOMOR HP	BIDANG	NHK	Status Akun WL	Tahun WL
1	1801042512810010	ADI DESTRIADI SUTISNA	KEPALA BALAI	BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	adidestriadi@pertanian.go.id	082182624899	EKSEKUTIF	1013140	Online	2024
2	1871055112720003	BRILLIANIA	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	nia.oezair@gmail.com	082181686663	EKSEKUTIF	786775	Online	2024
3	1812021311890011	EVRIYADI	BENDAHARA PENGELUARAN	BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	evribpplampung@yahoo.co.id	08116111321	EKSEKUTIF	715015	Online	2024
4	1807082807750001	JOHAN WAHYUDI	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	j.wahyudi@pertanian.go.id	08127974197	EKSEKUTIF	277277	Online	2024
5	1802074107920025	KURNIYATI	BENDAHARA PENERIMA	BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	kurniyati@pertanian.go.id	082372687506	EKSEKUTIF	880250	Online	2024
6	1871055805860010	MAIDA RUDIN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	maidarudin@pertanian.go.id	085269464423	EKSEKUTIF	Proses Verifikasi Belum Selesai	Online	2024



Lampung Selatan, 31 Maret 2025

Mengetahui,  
Kepala Balai,

Dr. P. Adi Destriadi Sutisna, SP., MP.

NIK: 1801042512810010



**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ADI DESTRIADI SUTISNA
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 1013140

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.008.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/20 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/35 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 358.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 330.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, SUZUKI AVI414F DX ERTIGA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 42.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 70.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.450.000.000

**III. HUTANG** Rp. 550.612.180

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 899.387.820

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BRILLIANIA  
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
3. NHK : 786775

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 598 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	175.000.000
1. MOBIL, HONDA HR-V / MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	75.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	10.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	1.760.000.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.760.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EVRIYADI  
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN  
3. NHK : 715015

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	622.000.000
1. Tanah Seluas 8.000 m2 di KAB / KOTA TULANG BAWANG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
2. Tanah Seluas 1.124 m2 di KAB / KOTA TULANG BAWANG BARAT, WARISAN Rp. 90.000.000		
3. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA TULANG BAWANG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/112 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 272.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	125.000.000
1. MOBIL, HONDA KENDARAAN RODA EMPAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	13.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	760.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	125.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	635.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JOHAN WAHYUDI  
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
3. NHK : 277277

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/286 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	144.000.000
1. MOBIL, FORD ECOSPORT MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA N MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	34.480.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	1.548.935
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	930.028.935
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	930.028.935

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi





pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KURNIYATI  
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA  
3. NHK : 880250

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 182.000.000

1. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000  
2. Tanah Seluas 176 m2 di KAB / KOTA KOTA METRO , HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 105.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000  
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 568.620

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 287.568.620

**III. HUTANG** Rp. 84.916.380

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 202.652.240

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.